

RINGKASAN

**Fahmi
210510225**

**Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap
Penggunaan Alat Tangkap Ikan Destruktif
(Kompresor) Yang Dilakukan Kelompok
Masyarakat Nelayan Kabupaten Simeuleu**

(Dr. Mukhlis, S.H., M.H dan Zulfan, S.H., M.Hum)

Praktik perikanan destruktif, termasuk bom ikan, sianida, dan kompresor, menjadi penyebab utama kerusakan ekosistem laut. Penggunaan alat tangkap kompresor memiliki dampak negatif yang nyata. Selain menyebabkan penurunan populasi ikan dan kerusakan habitat laut seperti terumbu karang, alat ini juga berisiko terhadap kesehatan nelayan. Secara hukum, pengelolaan perikanan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Regulasi ini melarang penggunaan alat tangkap destruktif seperti kompresor.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan efektivitas penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan kompresor, menjelaskan faktor yang penyebab nelayan masih menggunakan alat tangkap kompresor serta menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan kompresor di Kabupaten Simeuleu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan kondisi lapangan mengenai permasalahan yang dikaji dalam bentuk narasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan kompresor belum berjalan secara efektif. Meskipun telah terjadi penurunan presentase penggunaannya oleh nelayan kabupaten simeuleu, namun praktik penggunaan kompresor diwilayah tersebut masih tetap berlangsung. Kondisi ini tidak terlepas dari belum optimalnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengawasi dan menindak tegas pelanggaran yang terjadi. Faktor yang menyebabkan nelayan masih menggunakan alat tangkap kompresor yaitu hasil yang melimpah dibandingkan dengan cara yang digunakan oleh nelayan pada umumnya. Hambatan dalam penegakan hukum yaitu kelompok nelayan kompresor sudah menganggap bahwa hal tersebut telah menjadi tradisi dilingkungannya, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan alat tersebut.

Pemerintah disarankan membuat aturan secara khusus dilingkungan masyarakat nelayan yang berada di Kabupaten Simeuleu terhadap penggunaan alat tangkap kompresor. Dalam mengatasi hambatan, pemerintah disarankan menyediakan bantuan berupa alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan sehingga masyarakat meninggalkan alat kompresor tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Nelayan, Kompresor